

**ANALISIS EFEKTIVITAS PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
SECARA ELEKTRONIK (*E-PROCUREMENT*) PADA LAYANAN
PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE)
KOTA PALEMBANG**

SKRIPSI



**Nama : Ana Susilawati
NIM : 222016235**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2020**

SKRIPSI

**ANALISIS EFEKTIVITAS PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
SECARA ELEKTRONIK (*E-PROCUREMENT*) PADA LAYANAN
PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE)
KOTA PALEMBANG**

**Diajukan untuk Menyusun Skripsi pada
Program Strata Satu Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Palembang**



**Nama : Ana Susilawati
NIM : 222016235**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2020**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang Bertanda Tangan dibawah ini :

Nama : Ana Susilawati
NIM : 222016235
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
Judul Skripsi : Analisis Efektivitas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik (*E-Procurement*) Pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Palembang

Dengan ini Saya Menyatakan :

1. Karya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik sarjana strata 1 (satu) baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagian acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya ini serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.



Ana Susilawati

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Palembang

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Analisis Efektivitas Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah
Secara Elektronik (*E-Procurement*) Pada Layanan
Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Palembang
Nama : Ana Susilawati
NIM : 222016235
Fakultas : Ekonomi
Program studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik

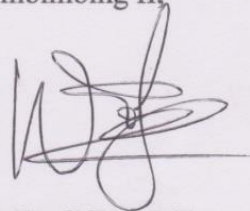
Diterima dan disahkan
Pada Tanggal, Februari 2020

Pembimbing I,



DR. Sa'adah Siddik, S.E., Ak., M.Si., C.A
NIDN/NBM : 0002095507/972321

Pembimbing II,



Welly, S.E., M.Si
NIDN/NBM : 0212128102/1085022

Mengetahui,
Dekan

u.b. Ketua Program akuntansi



Betri Sirajuddin, SE., M.Si., AK., CA
NIDN/NBM: 0216106902/944806

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

- ❖ **Visi tanpa Eksekusi adalah Halusinasi**

(Ana Susilawati)

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- ❖ **Ibu dan Bapak yang selalu**

Mendoakanku

- ❖ **Saudara-Saudari dan keluargaku**

- ❖ **Dosen Pembimbing**

- ❖ **Almamaterku**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PRAKATA

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah rabbil'alaamiin, dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, kesempatan, rahmat serta karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **Analisis Efektivitas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik (E-Procurement) Pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Palembang**. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.

Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan sistem *e-procurement* pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Palembang dapat dikatakan cukup efektif. Hal ini dapat dilihat dari tercapainya tujuan dari *e-procurement* yaitu: meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, memperbaiki efisiensi proses pengadaan, meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, mendukung proses monitoring audit dan memenuhi kebutuhan informasi yang *realtime*.

Penulis menyadari penulisan skripsi ini tidak luput dari kekurangan dan kesalahan. Skripsi ini tentu tidak akan selesai tanpa dorongan dan dukungan dari berbagai pihak. Penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orangtua tercinta (Imron dan Halimah) yang telah mendidik, mendoakan, membiayai, menemani dan

memberi semangat serta kasih sayang yang begitu besar kepada penulis dalam penulisan ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu DR. Sa'adah Siddik, S.E.,Ak.,M.Si.,C.A, selaku pembimbing I dan Ibu Welly, S.E.,M.Si selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, semangat serta saran-saran dengan tulus dan ikhlas serta penuh kesabaran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Selain itu disampaikan juga terimakasih kepada pihak-pihak yang telah mengizinkan penulis dalam menempuh pendidikan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang:

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, S.E., M.M., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Drs. H. Fauzi Ridwan, M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Betri, S.E.,M.Si.,Ak.,CA dan Ibu Nina Sabrina, S.E., M.Si selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Dosen serta karyawan/karyawati Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Pegawai di Kantor Layanan Pengadaan Secara Elektronik dan Unit Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Kota Palembang yang telah memberikan izin dalam penelitian ini.
6. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas setiap bantuan yang diberikan guna menyelesaikan tulisan ini. Akhirul kalam dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih yang seikhlas-ikhlasnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga amal dan ibadah yang dilakukan mendapat balasan dari Allah SWT.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Palembang, Februari 2020

Penulis

Ana Susilawati

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	ii
HALAMAN TANDA PENGESAHAN SKRIPSI	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
PRAKATA	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	
A. Landasan Teori	11
1. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	11
2. <i>E-Procurement</i>	19
3. Efektivitas Sistem <i>E-Procurement</i> dalam Pengadaan	

Barang/ Jasa.....	21
B. Penelitian Sebelumnya	24
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	30
B. Lokasi Penelitian	31
C. Operasionalisasi Variabel	31
D. Data yang diperlukan.....	31
E. Metode Pengumpulan Data	32
F. Analisis Data dan Teknik Analisis	34
1. Analisis Data.....	34
2. Teknik Analisis.....	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian.....	36
1. Sejarah LPSE Kota Palembang	36
2. Visi dan Misi	38
3. Struktur Organisasi LPSE Kota Palembang	39
4. Tugas dan Fungsi LPSE Kota Palembang.....	41
5. Pembagian Tugas.....	42
6. Gambaran Karakteristik Responden Penelitian.....	47
B. Pembahasan Hasil Penelitian.....	48
1. Indikator Meningkatkan Transparansi.....	49
2. Indikator Meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat.....	55

3. Indikator Memperbaiki Efisiensi dalam proses pengadaan.....	59
4. Indikator Mendukung Proses Monitoring Audit	65
5. Indikator Memenuhi Kebutuhan Informasi yang <i>Realtime</i>	67

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan.....	71
B. Saran	72

DAFTAR PUSTAKA73

LAMPIRAN74

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Status <i>E-Tendering</i> LPSE Kota Palembang 2016-2018	7
Tabel II.1	Kriteria Pengukuran Efektivitas.....	23
Tabel II.2	Persamaan dan Perbedaan Penelitian Sebelumnya	28
Tabel III.1	Operasionalisasi Variabel	31
Tabel IV.1	Gambaran Karakteristik Responden	47
Tabel IV.2	Hasil Perhitungan Tiap Indikator.....	48
Tabel IV.3	Rekapitulasi Hasil Kuesioner Meningkatkan transparansi	49
Tabel IV.4	Rekapitulasi Hasil Kuesioner Meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat	55
Tabel IV.5	Rekapitulasi Hasil Kuesioner Indikator Memperbaiki efisiensi dalam proses pengadaan.....	60
Tabel IV.6	Rekapitulasi Hasil Kuesioner Indikator Mendukung proses monitoring Audit.....	65
Tabel IV.7	Rekapitulasi Hasil Kuesioner Indikator Memenuhi kebutuhan akses informasi yang <i>realtime</i>	67

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar II.1 Prinsip Pengadaan Barang/Jasa	13
Gambar IV.1 Sturktur Organisasi LPSE Kota Palembang	40
Gambar IV.1 Grafik Rekapitulasi Hasil Kuesioner	69

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Surat Riset Penelitian
Lampiran 2	Surat Keterangan Selesai Riset
Lampiran 3	Aktivitas Bimbingan Skripsi
Lampiran 4	Sertifikat TOEFL
Lampiran 5	Sertifikat menghafal Surat-Surat Pendek
Lampiran 6	Sertifikat BUMdes
Lampiran 7	Abstrak
Lampiran 8	Bebas Plagiat
Lampiran 9	Kuesioner
Lampiran 10	Biodata Penulis

ABSTRAK

Ana Susilawati/222016235/2020/Analisis Efektivitas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik (*e-procurement*) Pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Palembang

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab masalah yang ada yaitu bagaimanakah efektivitas pengadaan barang /jasa pemerintah secara elektronik (*e-procurement*) pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Palembang. Tujuannya untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas pengadaan barang /jasa pemerintah secara elektronik (*e-procurement*) pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Palembang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Deskriptif. Tempat penelitian dilakukan di Kantor Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Palembang. Data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan Kuesioner. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Hasil analisis menunjukkan bahwa pelaksanaan Sistem *e-procurement* pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Palembang dapat dikatakan cukup efektif. Hal ini dapat dilihat dari tercapainya tujuan dari *e-procurement* yaitu: meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, memperbaiki efisiensi proses pengadaan, meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, mendukung proses monitoring audit dan memenuhi kebutuhan informasi yang *realtime*. Kendala permasalahan jaringan yang cenderung prosedural yang dapat menghambat proses pengadaan barang/jasa dan masih terdapat tender yang gagal dapat disebabkan kesalahan dalam proses evaluasi dan dapat mengurangi nilai keefektivan *e-procurement*.

Kata kunci: *e-procurement*, pengadaan barang/jasa, efektivitas.

ABSTRACT

Ana Susilawati / 222016235 / 2020/ Analysis of the Effectiveness of Government Procurement of Goods / Services Electronically (e-procurement) at the Electronic Procurement Service of Palembang City

This research was conducted to address existing problems, namely how the effectiveness of electronic procurement of goods / services (e-procurement) in the Electronic Procurement Service (LPSE) of Palembang City. The aim is to find out and analyze the effectiveness of electronic government procurement of goods / services (electronic procurement) at the Palembang City Electronic Procurement Service (LPSE). This research uses descriptive research type. The location of the study was conducted in the Office of Electronic Procurement Services (LPSE) of Palembang City. The data used are primary and secondary data. Data collection techniques used in this study were interviews and questionnaires. The data analysis method used in this study is qualitative. The analysis shows that the implementation of the e-procurement system in the Palembang Electronic Procurement Service (LPSE) can be said to be quite effective. This can be seen from the achievement of e-procurement objectives, namely: increasing transparency and accountability, increasing the efficiency of the procurement process, increasing market access and fair business competition, simplifying the audit monitoring process and meeting realtime information needs. Network problems that tend to be procedural that can hamper the process of procurement of goods / services and tenders that still fail can be caused by errors in the evaluation process and can reduce the value of e-procurement effectiveness.

Keywords: electronic procurement, procurement of goods / services, effectiveness.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengadaan barang jasa adalah upaya untuk mendapatkan barang dan jasa yang diinginkan dengan dilakukannya atas dasar pemikiran yang logis dan sistematis (*the system of thought*), mengikuti norma dan etika yang berlaku, berdasarkan metoda dan proses pengadaan yang baku. (Adrian, 2016: 5).

Permasalahan umum dalam pengadaan barang dan jasa yang timbul sebagai dampak atas era globalisasi dan proses demokratisasi dalam pengadaan barang dan jasa adalah *Inefisiensi*, artinya pengadaan barang dan jasa selama ini masih belum menghasilkan harga yang kompetitif. Harga barang dan jasa yang diperoleh melalui proses pengadaan barang dan jasa cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan pembelian langsung/harga pasar. Permasalahan selanjutnya lemahnya daya saing nasional, artinya pelaksanaan pengadaan yang tidak efisien dan iklim usaha yang tidak sehat (adanya unsur korupsi, kolusi dan nepotisme) sehingga menimbulkan ekonomi biaya tinggi sehingga harga tidak kompetitif dan menyebabkan belanja publik tidak mendorong pertumbuhan industri dalam negeri. Permasalahan yang terakhir adalah pendekatan yang protektif artinya, banyaknya pembatasan dalam keikutsertaan dunia usaha seperti penggolongan usaha (besar, menengah dan kecil). Pendekatan ini tidak mendapatkan sumbangan yang berarti bagi peningkatan daya saing nasional dan tumbuh kembangnya usaha. (Adrian, 2016: 7)

Pada era reformasi dewasa ini, sebagaimana dikehendaki oleh masyarakat luas, pemerintah tengah berusaha mewujudkan pemerintah yang terbuka dan demokratis salah satunya dengan meningkatkan dan mengoptimalkan pelayanan publik terhadap masyarakat melalui kebijakan/ peraturan yang efektif, efisien, mencerminkan keterbukaan/ transparansi, mengingat masyarakat berhak untuk memperoleh jaminan terhadap akses informasi publik/ kebebasan terhadap informasi. Pemerintah sepatutnya menjalankan tugas secara proporsional dengan maksimal demi tercapainya pemerintah yang baik/*good governance*, sehingga pemerintah yang bersih dapat terwujud (Adrian, 2016: 252).

Good governance dapat diartikan sebagai pemerintahan yang baik. Sementara itu mendefinisikan *good governance* sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi, dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta menciptakan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha (Muindro, 2008: 19)

Berdasarkan Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 menimbang bahwa kemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan dan pendayagunaan informasi dalam volume yang besar secara cepat dan akurat. Dalam menciptakan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan meningkatkan layanan publik yang efektif dan efisien diperlukan adanya kebijakan dan strategi pengembangan

e- government. Pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam proses pemerintahan (*e-government*) akan meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Salah satu bentuk penyelenggaraan *e-government* untuk mencapai *good governance* adalah pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik (*e-procurement*). Banyaknya proses pengadaan barang/jasa dilakukan dengan tersembunyi atau berpura-pura melakukan proses transparan dengan pengaturan orang dalam, padahal sebenarnya jelas-jelas merupakan praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), untuk mengatasi hal tersebut tentulah diperlukan proses yang terbuka melalui *e-procurement* atau proses pengadaan barang/jasa secara *online* melalui internet yang akan mendapatkan pengawasan dari masyarakat. (Adrian, 2016: 253). Proses tender proyek di berbagai daerah seringkali dirasakan tidak adil dan tidak transparan oleh sebagian pengusaha karena yang mendapatkan proyek biasanya adalah mereka yang mempunyai hubungan dekat dengan penguasa (Agus, 2008: 164).

E-procurement adalah sebuah sistem lelang dalam pengadaan barang/ jasa dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi berbasis internet. Dengan *e-procurement* proses lelang dapat berlangsung secara efektif, efisien, terbuka, bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel sehingga diharapkan dapat mencerminkan keterbukaan/ transparansi dan juga meminimalisir praktik curang KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) dalam lelang pengadaan barang yang dapat merugikan keuangan negara. (Adrian, 2016 : 254).

Keharusan melakukan pengumuman pengadaan barang/jasa melalui *e-procurement (website)* telah ditegaskan dalam pasal 1 angka 37 Perpres No. 54 Tahun 2010, pengadaan secara elektronik atau *e-procurement* adalah pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sejak ditetapkan Perpres No. 54 Tahun 2010 semua Kementrian, LNPD (Lembaga Pemerintah Non Departemen), Perangkat Daerah dan instansi lain wajib menggunakan *e-procurement* (Adrian, 2016: 253).

Berdasarkan Perpres No 16 Tahun 2018 Pasal 3 Ayat (1) Pengadaan Barang/Jasa dalam Peraturan Presiden ini meliputi: Pengadaan Barang, Pekerjaan Konstruksi, Jasa Konsultansi; dan Jasa Lainnya. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah. (Lkpp.go.id: 2018).

Menurut Abdul (2016: 130) efektivitas adalah ukuran berhasil atau tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai kegiatan yang telah ditetapkan. Pengukuran efektivitas atau tidak penerapan sistem *e-procurement* di sebuah instansi pemerintah dapat dilihat dari ukuran tujuan yang tercantum pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah pada pasal 107 yaitu terdiri dari: Indikator meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, Indikator meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, Indikator memperbaiki tingkat efisiensi

proses pengadaan. Indikator mendukung proses monitoring dan audit; dan Indikator memenuhi kebutuhan akses informasi yang *real time*.

Beberapa Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Arindrakk (2012), Hasil penelitiannya menyatakan bahwa penerapan *e-procurement* di Kabupaten Bojonegoro dapat dikatakan kurang efektif. Hal ini dikarenakan bahwa terdapat satu tujuan yang belum tercapai secara maksimal, yaitu peningkatan persaingan usaha yang sehat karena ditemukan adanya indikasi “main mata”. Indikasi tersebut mengurangi keefektifan penerapan *e-procurement* dalam pengadaan barang dan jasa.

Penelitian Sebelumnya dilakukan oleh Maharani dkk (2016), hasil penelitian dari segi efektivitas sudah berjalan dengan baik dan efektif. Hal tersebut ditunjukkan dengan transparansi bahwa proses pengadaan barang/jasa dapat diperoleh secara terbuka dan mudah oleh semua pihak.

Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad & Sri (2018) dengan hasil penelitian yaitu Pelaksanaan *e-procurement* di Kota Malang berjalan efektif terbukti dari banyaknya paket yang diproses dalam *e-procurement* berjalan dengan lancar. Sistem pelelangannya juga sangat transparan. Namun, mengalami beberapa hambatan, yaitu permasalahan sistem sehingga memperlambat proses tendering.

Penelitian yang dilakukan oleh Agung dkk (2019) hasil penelitiannya yaitu Pelaksanaan sistem *e-procurement* dalam proses pengadaan barang/ jasa pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya sudah efektif. Hal ini tercermin pada telah tercapainya lima indikator efektivitas sistem *e-procurement*, yaitu: meningkatkan

transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan, mendukung proses monitoring dan audit; memenuhi kebutuhan akses informasi yang *real time*.

Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Palembang adalah unit kerja yang dibentuk diseluruh Kementrian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya untuk menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik serta memfasilitasi ULP (Unit Layanan Pengadaan) / Pejabat Pengadaan pada Kementrian / Lembaga / Perguruan Tinggi/BUMN yang tidak membentuk LPSE dapat menggunakan LPSE yang terdekat dengan tempat kedudukannya untuk melaksanakan pengadaan secara elektronik (Lpse. Palembang.go.id : 2019).

Berdasarkan hasil wawancara kepada M. Nur selaku Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kota Palembang menurutnya dalam proses pengumuman lelang, pendaftaran lelang penjelasan pekerjaan, tahapan evaluasi dan kualifikasi, dan tahapan penetapan pemenang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sudah berupaya berlaku adil. Dalam tahap penawaran harga harus sesuai dengan ketentuan yaitu di bawah HPS dan di bawah pagu anggaran, selanjutnya dipilih harga terendah kalau harga terendah ternyata gugur dan tidak bersyarat terus memilih harga yang selanjutnya, tapi masih dilihat lagi spesifikasi perusahaan nya apabila perusahaan fiktif maka tidak akan dipilih. Menurutnya *e-procurement* dapat mencegah korupsi pengadaan barang dan jasa. Masih terdapat praktik KKN diakibatkan bukan dalam proses lelang melainkan dalam pelaksanaan pekerjaannya.

Berdasarkan hasil wawancara tambahan kepada Pujia selaku staf LPSE menurutnya apabila masih terdapat KKN dalam pengadaan barang dan jasa tersebut hanya dilakukan oleh hacker. Kendala dalam penerapan *e-procurement* ini adalah jaringan yang tidak stabil, permasalahan sistem yang prosedural sehingga memperlambat proses tendering dan *data base* yang hilang sehingga menyebabkan perlu direstart ulang dan memerlukan waktu hal ini dapat menghambat proses pengadaan dan dapat mengurangi tingkat efisiensi dalam proses pengadaan barang/jasa karena tender tidak dapat diselesaikan sesuai dengan semestinya.

Berikut Rekapitulasi transaksi *e-tendering* yang menggunakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) di Kota Palembang dari tahun 2016-2019 dapat dilihat pada tabel I.1

Tabel. I.1
Status E-Tendering LPSE Kota Palembang 2016-2018

No	Uraian	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah Paket	637 Paket	448 Paket	570 Paket	539 Paket
2.	Jumlah Paket Selesai	637 Paket	448 Paket	570 Paket	530 Paket
3.	Nilai Pagu	612.139.517.433	447.918.980.205	585.047.141.206	659.999.010.301
4	Nilai HPS	609.392.371.836	440.537.315.943	575.388.563.154	654.974.620.174
5.	Nilai Kontrak	600.873.946.262	432.434.616.653	552.944.008.794	598.152.944.450
6.	Penghematan Terhadap Pagu	11.265.571.171	15.560.689.552	31.862.547.131	57.696.065.851
7.	Nilai Tender Gagal	0	0	0	4.150.000.000
8.	Penghematan Terhadap Pagu	1,84%	3,47%	5,45%	8,74%

Sumber: *Smart Report LPSE Kota Palembang, 2019*

Berdasarkan data tersebut terjadi peningkatan efisiensi pagu anggaran yaitu pada tahun 2016 sebanyak 1,84% dengan nilai efisiensi pagu anggaran sebesar Rp. 11.265.571.171, terjadi peningkatan pada tahun 2017 sebanyak 3,47% dengan efisiensi nilai pagu anggaran sebesar Rp. 15.560.689.552, selanjutnya pada tahun 2018 terjadi peningkatan sebanyak 5,45% dengan nilai efisiensi pagu anggaran sebesar 31.862.547.131 dan yang terakhir pada tahun 2019 terjadi peningkatan sebanyak 8,74% dengan total nilai efisiensi pagu sebesar 57.696.065.851.

Terjadi peningkatan efisiensi pagu anggaran akan tetapi masih terdapat lelang yang gagal pada tahun 2019 yaitu dengan 9 Paket yang gagal. Kegagalan paket tender dapat berakibat kurangnya efisiensi dalam pengadaan barang jasa. Tender yang biasanya bisa diselesaikan dengan 100% tetapi pada tahun 2019 hanya dapat diselesaikan sebesar 98% sedangkan pada tahun sebelum-sebelumnya tender dapat selesai dengan jumlah dan waktu yang telah ditentukan. Masih adanya tender yang gagal berarti masih adanya permasalahan didalamnya karena tidak mencapai salah satu tujuan *e-procurement* yaitu meningkatkan efisiensi proses pengadaan barang/jasa karena tender tidak dapat diproses dengan target waktu dan jumlah yang telah ditetapkan. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian kembali yang berjudul” **Analisis Efektivitas Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah Secara Elektronik (*E-Procurement*) Pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Palembang.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah efektivitas pengadaan barang /jasa pemerintah secara elektronik (*e-procurement*) pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Palembang.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari perumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas pengadaan barang /jasa pemerintah secara elektronik (*e-procurement*) pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Palembang.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan, maka penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi semua pihak diantaranya:

1. Bagi Penulis

Sebagai bukti empiris yang ada tentang efektivitas pengadaan barang /jasa pemerintah secara elektronik (*e-procurement*) pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Palembang.

2. Bagi Pemerintah Khususnya LPSE Kota Palembang

Para Pemerintah khususnya LPSE Kota Palembang diharapkan meningkatkan efektivitas pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik (*e-procurement*) pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Palembang.

3. Bagi Almamater

Hasil Penelitian ini dapat menjadi referensi tambahan, menambah ilmu pengetahuan, serta dapat menjadi acuan atau kajian bagi penulisan di masa yang akan datang.

Daftar Pustaka

- Abdul Halim & Muhammad Syam Kusufi. 2016. *Teori, Konsep, dan Aplikasi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat
- Agung Suprianto, Soesilo Zauhar & Bambang Santoso Haryono (2019) Analisis Efektivitas Sistem *E-Procurement* dalam Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Studi pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik* 5(2): 242-250
- Agus Dwiyanto. 2008. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Andrian Sutedi. 2016. *Aspek Hukum Pengadaan Barang & Jasa dan Berbagai Permasalahannya*. Jakarta: Sinar Grafika
- Ardiansyah (2017) Efektivitas Sistem Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik pada Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kota Serang. *SENASSET* ISBN: (978-602-73671-0): 108-114
- Arindra Rossita Arum Nurchana, Bambang Santoso Haryono & Romula Adiono (2014) Efektivitas *E-Procurement* Dalam Pengadaan Barang/Jasa (Studi terhadap Penerapan *E-Procurement* dalam Pengadaan Barang/Jasa di Kabupaten Bojonegoro). *Jurnal Administrasi Publik* 2(2): 355 -359
- Beni Pakei. 2016. *Konsep dan Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi*. Jakarta: Taushia
- Fitriyah Fauzi, Abdullah Basyith Dencik, Dian Isnaini Asiati. 2019. *Metodologi Penelitian untuk Manajemen dan Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat
- Ihyaul Ulum. 2012. *Audit Sektor Publik*. Jakarta: PT.Bumi Aksara
- Indra Bastian. 2010. *Akuntansi Sektor Publik (suatu pengantar)*. Jakarta: PT. Penerbit Erlangga
- Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Pengembangan *e-Government*
<https://www.bappenas.go.id/id/data-dan-informasi-utama/produk-hukum-peraturan->

[perundangan/inpres/inpres-no3-tahun-2003-tentang-kebijakan-dan-strategi-nasional-pengembangan-e-government/](#) diakses pada tanggal 28 Oktober 2019

LKPP. 2010. *Pengantar Pengadaan Barang dan Jasa di Indonesia (Modul 1)*. Jakarta: LKPP

LKPP. 2010. *Penggunaan e-Procurement (Modul 10)*. Jakarta: LKPP

LPSE Kota Palembang tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) diakses di <https://lpse.palembang.go.id/eproc/tentangkami> pada tanggal 28 Oktober 2019

Maharany Arsyad, La Ode Suriadi, & Syamsul Anam (2016) Analisis Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik (*E-Procurement*) Pada LPSE Kota Kendari. *Jurnal Ekonomi* 1(1): 01-11

Mahmudi. 2010. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN

Muindro Renyowijoyo. 2008. *Akuntansi Sektor Publik Organisasi Non Laba*. Jakarta: Mitra Wacana Media

Muhammad Mujtaba Habibi & Sri Untari (2018) Efektivitas Pelaksanaan *E-Procurement* Dalam Pengadaan Barang dan Jasa. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 3 (2): 159-168

Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Suhendri (2015) Efektivitas Pelaksanaan *E-Procurement* dalam Mendukung *Good Governance* di Provinsi Riau . *JOM FISIP* 2(2): 1-13

Utari Swadesi (2017) Efektivitas Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik (*E-procurement*) Pada LPSE Kota Pekanbaru. *Jom FISIP* 4(2): 01-13

V. Wiratna Sujarweni. 2018. *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi Pendekatan Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Baru